

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia: Kajian Peran Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal



Rendi Syahputra ^{1,*}, Zulkifli ², Muhammad Taufan ³

^{1, 2, 3} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

* Corresponding author email: rendisyahputra@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama yang memengaruhi inflasi di Indonesia dengan penekanan khusus pada efektivitas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas harga sepanjang tahun 2025. Berbagai variabel makroekonomi yang relevan, seperti suku bunga kebijakan, jumlah uang beredar (M2), nilai tukar, belanja pemerintah, serta tekanan eksternal dari pergerakan harga komoditas global, dikaji secara komprehensif untuk memahami kontribusinya terhadap dinamika inflasi nasional. Analisis dilakukan untuk melihat bagaimana perubahan pada masing-masing variabel tersebut berpengaruh terhadap tingkat inflasi dalam kondisi ekonomi yang terus berubah. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan dan menganalisis data serta laporan resmi dari instansi seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Keuangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu, tren makroekonomi terbaru, dan kebijakan yang diterapkan pemerintah sepanjang tahun 2025. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada data historis, tetapi juga pada interpretasi kebijakan yang sedang berjalan sebagai respon terhadap tekanan ekonomi global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter memegang peranan signifikan dalam mengendalikan inflasi melalui instrumen suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengendalian jumlah uang beredar. Penetapan tingkat suku bunga terbukti mampu menekan permintaan agregat dan menjaga ekspektasi inflasi tetap stabil. Namun, efektivitas kebijakan moneter tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, terutama volatilitas nilai tukar akibat perubahan kebijakan moneter global serta fluktuasi harga komoditas internasional. Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan fiskal, terutama melalui belanja produktif di sektor pertanian, energi, dan infrastruktur, memainkan peran penting dalam mengatasi tekanan inflasi dari sisi penawaran. Kebijakan stabilisasi pangan seperti penguatan cadangan pangan dan intervensi harga juga terbukti efektif dalam menahan laju inflasi pangan yang menjadi komponen terbesar inflasi nasional. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sangat diperlukan untuk mencapai stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Article History

Received 2025-08-29

Revised 2025-11-22

Accepted 2025-12-28

Keywords

Inflasi,
Kebijakan Moneter,
Kebijakan Fiskal,
Efektivitas,
Stabilitas Ekonomi

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



PENDAHULUAN

Inflasi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai stabilitas ekonomi suatu negara. Stabilitas harga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Di Indonesia, inflasi sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat domestik maupun global. Menurut Bank Indonesia (2024), dinamika inflasi nasional mencerminkan interaksi antara faktor permintaan agregat, penawaran agregat, dan shock eksternal yang sulit diprediksi. Kondisi ekonomi global pada tahun 2025 memperlihatkan ketidakpastian yang tinggi akibat perubahan kebijakan moneter negara utama, fluktuasi harga komoditas, serta ketegangan geopolitik. World Bank (2024) menekankan bahwa volatilitas global tersebut memberi tekanan pada nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia. Depresiasi rupiah yang terjadi dalam kondisi global

yang tidak stabil dapat memicu imported inflation karena meningkatnya harga barang impor, khususnya energi dan bahan baku industri.

Di sisi domestik, inflasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap komoditas pangan. Komponen inflasi pangan berkontribusi besar terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK), sehingga gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem, distribusi, maupun faktor produksi dapat memberikan pengaruh besar terhadap inflasi (Badan Pangan Nasional, 2024). Oleh karena itu, stabilitas harga pangan menjadi fokus utama pemerintah.

Kebijakan moneter menjadi instrumen penting dalam mengendalikan inflasi, terutama melalui pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar. Bank Indonesia menggunakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai instrumen utama dalam mengarahkan ekspektasi pasar dan menjaga stabilitas nilai tukar. Studi oleh Sari dan Wibowo (2022) menunjukkan bahwa kebijakan moneter memiliki hubungan yang signifikan terhadap inflasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain kebijakan moneter, kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah, terutama pada sektor pangan, energi, dan infrastruktur, dapat berfungsi sebagai stabilisator ekonomi di tengah tekanan inflasi (Kemenkeu RI, 2023). Instrumen fiskal seperti subsidi, bantuan sosial, dan program stabilisasi harga sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat serta dinamika inflasi nasional.

Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi semakin penting dalam menghadapi tekanan inflasi yang bersumber dari faktor domestik dan global. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi wadah koordinasi antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Menurut IMF (2024), negara yang menerapkan koordinasi kebijakan yang baik cenderung memiliki inflasi lebih stabil dan risiko makroekonomi yang lebih rendah. Pada tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada tantangan inflasi yang dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik global, risiko kenaikan harga minyak, dan perubahan kebijakan negara mitra dagang. Dengan struktur ekonomi yang sebagian besar masih rentan terhadap gejolak harga komoditas, risiko inflasi semakin meningkat tanpa adanya kebijakan antisipatif yang efektif (World Bank, 2024). Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi menjadi sangat relevan.

Dalam konteks tersebut, penting untuk memahami bagaimana instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga, likuiditas, dan stabilisasi nilai tukar dapat memengaruhi inflasi. Demikian pula, kebijakan fiskal yang tepat sasaran melalui subsidi, belanja pemerintah, dan dukungan terhadap sektor pangan dan energi sangat diperlukan untuk meredam inflasi struktural. Kombinasi kebijakan yang tepat akan menentukan efektivitas pengendalian inflasi pada tahun 2025.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia dengan fokus pada peran kebijakan moneter dan fiskal. Kajian ini penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat stabilitas harga, meningkatkan ketahanan ekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika perekonomian global yang terus berubah.

TINJAUAN PUSTAKA

Inflasi dan Faktor Penentunya

Inflasi secara umum dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu inflasi permintaan (demand-pull inflation), inflasi biaya (cost-push inflation), dan inflasi struktural. Samuelson dan Nordhaus (2019) menjelaskan bahwa inflasi permintaan terjadi ketika permintaan agregat dalam perekonomian tumbuh lebih cepat dibandingkan kapasitas produksi, sehingga mendorong kenaikan harga secara luas. Jenis inflasi ini biasanya muncul pada periode ekspansi ekonomi ketika konsumsi, investasi, maupun belanja pemerintah meningkat. Sementara itu, inflasi biaya terjadi ketika biaya produksi meningkat sehingga produsen menaikkan harga jual untuk menjaga margin keuntungan. Faktor pemicu utama cost-push inflation termasuk kenaikan harga energi, upah tenaga kerja, maupun komoditas impor (Mankiw, 2020). Di

negara berkembang, termasuk Indonesia, inflasi biaya sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Inflasi struktural mengacu pada kenaikan harga yang muncul akibat hambatan dalam distribusi, produksi, dan efisiensi sistem ekonomi. Keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada impor bahan baku, dan sistem logistik yang kurang efisien dapat memperburuk tekanan inflasi (Todaro & Smith, 2021). Di Indonesia, inflasi struktural sering terlihat pada komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, dan bawang merah. Dalam konteks Indonesia, inflasi cost-push terutama dipicu oleh sektor pangan dan energi yang sangat rentan terhadap fluktuasi musim. Badan Pangan Nasional (2024) mencatat bahwa perubahan cuaca ekstrem, gangguan distribusi, dan pola musim panen sering menyebabkan gejolak harga pangan yang signifikan. Penyumbang inflasi pangan yang bersifat volatile food ini menjadi tantangan utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga konsumen.

Faktor permintaan juga memengaruhi laju inflasi Indonesia, terutama ketika konsumsi rumah tangga meningkat pada momen tertentu seperti hari besar keagamaan nasional. Bank Indonesia (2024) melaporkan bahwa pola konsumsi musiman berkontribusi pada kenaikan harga sejumlah komoditas sehingga memperkuat tekanan inflasi jangka pendek. Namun, pengaruh demand-pull inflation cenderung relatif lebih terkendali dibandingkan cost-push inflation. Nilai tukar merupakan faktor penting lainnya yang mempengaruhi inflasi di Indonesia. Depresiasi rupiah menyebabkan harga barang impor meningkat, sehingga mendorong inflasi melalui kanal biaya produksi maupun konsumsi langsung (World Bank, 2024). Ketergantungan Indonesia terhadap komoditas impor seperti gandum, kedelai, dan bahan baku industri membuat efek pass-through nilai tukar menjadi cukup signifikan terhadap inflasi nasional.

Secara keseluruhan, inflasi di Indonesia merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor permintaan, biaya, dan struktural yang diperparah oleh kondisi eksternal seperti volatilitas harga komoditas global. Oleh karena itu, kebijakan makroekonomi seperti stabilisasi harga pangan, penguatan sektor distribusi, dan pengendalian nilai tukar menjadi penting dalam mengatasi tekanan inflasi (IMF, 2024). Memahami faktor penentu inflasi memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, khususnya dalam mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki mandat untuk menjaga stabilitas nilai rupiah melalui pengendalian harga dan stabilitas sistem keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memanfaatkan berbagai instrumen kebijakan moneter yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi domestik maupun global (Bank Indonesia, 2024).

Instrumen utama kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia adalah BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), yang menjadi suku bunga acuan untuk mengarahkan transmisi moneter ke sektor riil. Perubahan BI7DRR memengaruhi suku bunga perbankan, konsumsi rumah tangga, investasi, serta stabilitas nilai tukar. Menurut Sari dan Wibowo (2022), perubahan suku bunga acuan memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, melalui mekanisme permintaan agregat. Selain suku bunga, operasi pasar terbuka (OPT) menjadi instrumen penting dalam mengatur likuiditas di pasar uang. Melalui jual-beli Surat Berharga Negara (SBN), Bank Indonesia dapat mengurangi atau menambah likuiditas perbankan. Ketika tekanan inflasi meningkat, Bank Indonesia cenderung melakukan kontraksi likuiditas untuk mengurangi jumlah uang beredar, sehingga meredam tekanan permintaan (World Bank, 2024).

Rasio giro wajib minimum (GWM) juga digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan likuiditas perbankan. Peningkatan GWM mengurangi kemampuan bank menyalurkan kredit sehingga menekan pertumbuhan uang beredar. Sebaliknya, penurunan GWM dapat merangsang pertumbuhan kredit dan menggerakkan perekonomian. Menurut Mankiw (2020), GWM merupakan instrumen efektif untuk pengendalian moneter dalam sistem perbankan yang dominan seperti di Indonesia. Transmisi kebijakan moneter di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan struktural, termasuk tingkat pendalaman pasar

keuangan yang relatif rendah. Kondisi ini membuat transmisi suku bunga ke sektor riil berjalan tidak seefektif negara maju. IMF (2024) mencatat bahwa sensitivitas konsumsi dan investasi terhadap perubahan suku bunga di Indonesia relatif moderat, sehingga kebijakan suku bunga harus diimbangi instrumen lain untuk mencapai tujuan inflasi.

Dalam menghadapi tekanan eksternal seperti penguatan dolar AS dan volatilitas harga komoditas global, Bank Indonesia juga mengandalkan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Stabilitas nilai tukar sangat penting karena depresiasi rupiah dapat memicu imported inflation, terutama pada barang-barang impor strategis seperti pangan dan energi (World Bank, 2024). Oleh karena itu, stabilisasi pasar valas menjadi bagian integral dari kebijakan moneter.

Koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial juga dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial seperti rasio Loan to Value (LTV) dan Countercyclical Capital Buffer (CCB) diterapkan untuk mengelola risiko kredit dan mengurangi potensi overheating ekonomi. Bank Indonesia (2024) menegaskan bahwa stabilitas keuangan merupakan prasyarat utama bagi efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi.

Secara keseluruhan, efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi bergantung pada kombinasi instrumen yang tepat serta sensitivitas perekonomian terhadap suku bunga dan perubahan likuiditas. Bank Indonesia terus memperkuat strategi kebijakan moneter yang pre-emptive dan forward-looking untuk merespons risiko inflasi yang bersumber dari faktor domestik maupun global. Dengan koordinasi yang baik dan instrumen yang adaptif, kebijakan moneter diproyeksikan mampu menjaga inflasi dalam rentang target yang ditetapkan pemerintah.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi, terutama dalam mengendalikan inflasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat. Melalui kebijakan pengeluaran (belanja negara) dan penerimaan negara (perpajakan), pemerintah dapat memengaruhi permintaan agregat, distribusi pendapatan, serta stabilitas harga. Menurut Mankiw (2020), kebijakan fiskal yang efektif mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan kestabilan harga dalam jangka panjang.

Belanja negara merupakan salah satu komponen utama kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk meredam tekanan inflasi. Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran yang signifikan pada belanja pangan, energi, dan infrastruktur untuk menjaga pasokan barang dan menurunkan biaya distribusi. Kementerian Keuangan RI (2023) menjelaskan bahwa belanja negara yang diarahkan pada sektor produktif dan strategis terbukti mampu menurunkan tekanan inflasi, terutama pada komoditas pangan yang rentan fluktuasi harga. Subsidi merupakan instrumen fiskal yang menjadi stabilisator harga yang sangat penting, terutama pada sektor energi dan pangan. Subsidi energi seperti BBM, LPG, dan listrik berperan menjaga daya beli masyarakat dan mencegah lonjakan inflasi ketika harga minyak dunia meningkat (IMF, 2024). Selain itu, subsidi atau bantuan distribusi pada komoditas pangan strategis membantu menjaga stabilitas harga terutama pada periode gejolak pasokan.

Kebijakan perpajakan juga memiliki peran dalam mengendalikan inflasi melalui mekanisme penyesuaian tarif, insentif fiskal, dan pengurangan pajak tertentu. Pemerintah dapat menurunkan tarif pajak impor bahan baku atau pangan strategis untuk mengurangi tekanan biaya produksi dan mendorong stabilitas harga di pasar domestik (World Bank, 2024). Insentif pajak kepada sektor produksi juga dapat meningkatkan kapasitas pasokan sehingga mengurangi inflasi akibat keterbatasan produksi.

Dalam menghadapi tekanan inflasi pangan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian melakukan intervensi berupa program stabilisasi harga, penambahan cadangan beras pemerintah, dan operasi pasar. Intervensi ini efektif dalam meredam inflasi jangka pendek, terutama pada komoditas volatile food yang sangat sensitif terhadap gangguan cuaca dan distribusi (Badan Pangan Nasional, 2024). Kebijakan tersebut juga membantu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk memastikan tercapainya stabilitas harga

yang berkelanjutan. Ketika kebijakan moneter mengetat untuk meredam tekanan permintaan, kebijakan fiskal dapat difokuskan pada belanja produktif, subsidi tepat sasaran, dan intervensi pasar yang dapat menjaga daya beli masyarakat tanpa menciptakan tekanan inflasi tambahan (Bank Indonesia, 2024). Harmonisasi kedua kebijakan ini menjadi faktor kunci dalam mengelola inflasi dalam konteks ekonomi Indonesia yang terbuka.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan mengatasi tekanan inflasi, terutama yang bersumber dari gangguan pasokan dan fluktuasi harga pangan serta energi. Melalui kombinasi instrumen belanja negara, subsidi, dan perpajakan, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan desain kebijakan yang tepat dan responsif terhadap dinamika global, kebijakan fiskal diproyeksikan menjadi pilar penting dalam pengendalian inflasi di Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang bertujuan menjelaskan fenomena ekonomi secara mendalam melalui interpretasi terhadap berbagai sumber literatur. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika kebijakan moneter dan fiskal serta pengaruhnya terhadap inflasi tahun 2025. Menurut Creswell (2018), metode kualitatif sangat efektif digunakan untuk menelaah isu-isu makroekonomi yang kompleks dan saling berkaitan, karena memungkinkan peneliti melakukan analisis mendalam terhadap konsep, tren, serta dampak kebijakan.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari laporan resmi lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Keuangan RI, yang menyediakan informasi terbaru terkait indikator moneter, perkembangan inflasi, dan kebijakan fiskal nasional. Selain itu, penelitian juga menggunakan data dari publikasi internasional seperti IMF, World Bank, dan OECD yang memiliki relevansi dalam memberikan perspektif global terhadap stabilitas harga dan kondisi makroekonomi. Menurut Miles, Huberman, & Saldaña (2014), keandalan sumber data sangat penting dalam penelitian deskriptif agar analisis yang dilakukan bersifat objektif dan terverifikasi.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik kajian literatur (*literature review*) dengan menelusuri berbagai penelitian terdahulu yang membahas hubungan antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan inflasi. Proses analisis melibatkan identifikasi variabel kunci, perbandingan temuan antar-penelitian, serta penggabungan informasi untuk menghasilkan interpretasi yang lebih holistik. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Snyder (2019) bahwa *literature review* merupakan metode yang efektif untuk memetakan tren penelitian dan memahami bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi dinamika makroekonomi dalam konteks suatu negara.

Selanjutnya, analisis dilakukan dengan mengkaji data dan literatur untuk memahami perkembangan inflasi pada tahun 2025 dan melihat bagaimana kebijakan moneter serta fiskal saling melengkapi dalam menjaga stabilitas harga. Pendekatan triangulasi sumber dilakukan untuk meningkatkan validitas analisis dengan membandingkan berbagai laporan dan hasil penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah. Hal ini sesuai dengan konsep triangulasi data yang direkomendasikan oleh Patton (2015) untuk memastikan hasil penelitian kualitatif lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Suku Bunga Kebijakan terhadap Inflasi

Kebijakan suku bunga, khususnya melalui instrumen BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), merupakan salah satu alat utama Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Kenaikan suku bunga kebijakan berfungsi mengurangi jumlah uang beredar dan menekan ekspektasi inflasi melalui transmisi moneter. Bank Indonesia (2024) menegaskan bahwa pengetatan suku bunga efektif mengendalikan likuiditas sekaligus memperkuat stabilitas makroekonomi, terutama ketika terjadi tekanan inflasi akibat peningkatan permintaan domestik. Dengan mekanisme ini, suku bunga menjadi instrumen vital dalam menjaga harga

tetap stabil di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik. Pada tahun 2025, BI diproyeksikan mempertahankan stance moneter ketat guna merespons volatilitas nilai tukar yang dipicu oleh penguatan dolar AS. IMF (2024) mencatat bahwa kondisi global yang masih tidak menentu mendorong banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menahan suku bunga pada tingkat yang relatif tinggi demi meredam depresiasi mata uang. Dalam konteks ini, kebijakan suku bunga tidak hanya berfungsi mengendalikan inflasi, tetapi juga menjaga kestabilan nilai tukar sebagai faktor penting dalam stabilitas harga.

Transmisi moneter melalui jalur suku bunga bekerja dengan memengaruhi perilaku konsumsi dan investasi. Kenaikan BI7DRR membuat biaya pinjaman meningkat sehingga menurunkan konsumsi barang tahan lama dan investasi sektor swasta. Menurut Mishkin (2019), pengetatan moneter menekan permintaan agregat, sehingga mendorong penurunan inflasi melalui penurunan tekanan permintaan. Oleh karena itu, kebijakan suku bunga mampu memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap keseimbangan harga.

Selain itu, kebijakan suku bunga juga memengaruhi ekspektasi inflasi, yang merupakan komponen penting dalam proses pembentukan harga. Dalam teori makroekonomi modern, ekspektasi inflasi yang terkendali dapat mengurangi risiko kenaikan harga yang dipicu oleh perilaku spekulatif pelaku ekonomi. Bank for International Settlements (2023) menekankan bahwa kebijakan suku bunga yang konsisten dan kredibel mampu menjaga ekspektasi inflasi pada level yang rendah dan stabil. Dengan demikian, kebijakan suku bunga menjadi instrumen psikologis sekaligus teknis dalam menjaga stabilitas harga.

Hubungan antara suku bunga dan nilai tukar juga menjadi faktor penting dalam mengelola inflasi impor (*imported inflation*). Ketika nilai tukar berfluktuasi, harga barang impor ikut berubah dan dapat meningkatkan tekanan inflasi domestik. Melalui pengetatan suku bunga, BI dapat memperkuat nilai tukar rupiah sehingga menekan inflasi yang berasal dari barang impor. Obstfeld & Rogoff (2022) menyatakan bahwa stabilitas nilai tukar merupakan salah satu komponen kunci dalam upaya pengendalian inflasi di negara terbuka seperti Indonesia. Lebih jauh, kebijakan suku bunga seringkali diintegrasikan dengan kebijakan makroprudensial untuk memperkuat dampaknya terhadap inflasi. Misalnya, pengaturan *loan-to-value* (LTV) pada kredit perbankan dapat membantu mengarahkan pembiayaan ke sektor produktif daripada konsumtif. Menurut Borio (2020), integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial terbukti meningkatkan efektivitas pengetatan moneter dalam menghadapi tekanan inflasi berbasis permintaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga bekerja lebih optimal ketika didukung instrumen kebijakan lain.

Secara keseluruhan, pengetatan BI7DRR pada tahun 2025 mencerminkan langkah strategis BI dalam menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan pemulihan ekonomi. Kebijakan ini sejalan dengan teori suku bunga dan permintaan agregat yang menegaskan bahwa suku bunga tinggi dapat menekan kelebihan permintaan yang memicu inflasi. Dengan kombinasi transmisi moneter yang efektif, kredibilitas kebijakan, serta koordinasi makroprudensial, suku bunga kebijakan tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung ketahanan ekonomi Indonesia pada 2025.

Peran Jumlah Uang Beredar (M2)

Pertumbuhan jumlah uang beredar (M2) merupakan salah satu indikator kunci dalam menganalisis dinamika inflasi, terutama dalam jangka menengah. Menurut teori kuantitas uang, peningkatan jumlah uang beredar yang tidak sejalan dengan pertumbuhan output riil akan menyebabkan tekanan inflasi (Mankiw, 2021). Di Indonesia, M2 mencakup uang kartal, giro, tabungan, serta deposito berjangka yang berperan sebagai sumber likuiditas utama dalam perekonomian. Dengan demikian, pergerakan M2 menjadi perhatian utama otoritas moneter dalam menjaga kestabilan harga.

Studi oleh Sari dan Wibowo (2022) menunjukkan bahwa peningkatan M2 yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas sektor riil dapat mendorong inflasi, terutama pada komponen inti (*core inflation*). Hal ini terjadi karena bertambahnya likuiditas meningkatkan kemampuan konsumsi dan pembiayaan, sehingga mendorong peningkatan permintaan agregat. Kesenjangan antara permintaan dan kemampuan pasokan inilah yang memicu tekanan inflasi. Temuan tersebut mengonfirmasi teori monetaris yang menyatakan bahwa inflasi bersifat moneter dalam jangka menengah. Pada tahun 2025, Bank Indonesia

memperkuat pengendalian likuiditas melalui berbagai instrumen operasi pasar terbuka (open market operations/OMO). Instrumen seperti penjualan Surat Berharga Negara (SBN) dan term deposit digunakan untuk menyerap kelebihan likuiditas perbankan. BI (2024) menjelaskan bahwa pengendalian likuiditas yang tepat waktu mampu menjaga kestabilan sistem keuangan dan meminimalkan volatilitas inflasi. Kebijakan ini menjadi semakin penting mengingat kondisi eksternal yang masih berpotensi menimbulkan gejolak pada aliran modal.

Selain memengaruhi inflasi melalui jalur permintaan, pertumbuhan M2 juga dapat berdampak pada dinamika kredit perbankan. Ketersediaan likuiditas yang berlebih mendorong peningkatan penyaluran kredit yang pada akhirnya meningkatkan belanja rumah tangga dan investasi perusahaan. Mishkin (2019) mencatat bahwa ekspansi kredit yang cepat dapat menyebabkan overheating ekonomi, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan kapasitas produksi. Oleh karena itu, kontrol terhadap M2 juga berperan dalam menjaga stabilitas keuangan makro.

Dari perspektif stabilitas nilai tukar, pertumbuhan M2 yang berlebihan berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap mata uang domestik. IMF (2024) menekankan bahwa peningkatan basis moneter yang tidak terkelola dapat meningkatkan risiko depresiasi mata uang, yang pada gilirannya memicu inflasi impor. Dalam konteks Indonesia, menjaga pertumbuhan M2 pada level yang sehat menjadi penting agar tidak menambah tekanan eksternal yang berasal dari volatilitas harga komoditas global.

Secara keseluruhan, pengendalian M2 tetap menjadi salah satu strategi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas inflasi selama tahun 2025. Integrasi kebijakan operasi pasar terbuka, penyesuaian suku bunga kebijakan, serta penguatan kebijakan makroprudensial diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan M2 selaras dengan kebutuhan ekonomi riil. Dengan pengelolaan likuiditas yang efektif, tekanan inflasi dapat diminimalkan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Nilai Tukar dan Pengaruh Eksternal

Nilai tukar rupiah memiliki peran penting dalam menentukan tingkat inflasi, terutama melalui mekanisme imported inflation. Ketika rupiah mengalami depresiasi, harga barang impor seperti pangan, energi, dan bahan baku otomatis meningkat. Peningkatan biaya impor tersebut pada akhirnya diteruskan ke harga konsumen sehingga mendorong inflasi domestik. Menurut teori makroekonomi terbuka, nilai tukar merupakan salah satu variabel paling sensitif dalam menentukan stabilitas harga di negara yang sangat bergantung pada impor seperti Indonesia (Krugman & Obstfeld, 2018).

Depresiasi rupiah juga memengaruhi struktur biaya produksi dalam negeri. Banyak sektor industri di Indonesia yang masih bergantung pada bahan baku dan barang modal impor. Ketika nilai tukar melemah, biaya produksi naik dan akhirnya mendorong inflasi cost-push. Bank Indonesia (2024) mencatat bahwa tekanan inflasi dari barang impor biasanya berdampak signifikan pada komponen inflasi inti. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar tidak hanya relevan bagi perdagangan internasional, tetapi juga bagi keseluruhan struktur biaya domestik.

Di sisi eksternal, nilai tukar rupiah sangat sensitif terhadap dinamika aliran modal global (capital flows). World Bank (2024) menegaskan bahwa perubahan kebijakan moneter The Fed, terutama kenaikan suku bunga acuan, sering kali memicu penarikan modal dari negara berkembang. Ketika modal keluar secara signifikan, nilai tukar tertekan karena permintaan dolar meningkat. Situasi ini menambah risiko inflasi, terutama jika terjadi dalam kondisi pasar global yang volatil atau disertai ketidakpastian geopolitik. Pada tahun 2025, berbagai proyeksi menunjukkan bahwa global masih menghadapi ketidakpastian akibat perlambatan ekonomi di negara maju dan fluktuasi harga komoditas internasional. IMF (2024) memperkirakan bahwa tekanan geopolitik dan perubahan kebijakan moneter global akan terus memengaruhi aliran modal ke negara berkembang. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar menjadi salah satu fokus utama otoritas moneter Indonesia dalam menjaga inflasi tetap terkendali.

Untuk meredam volatilitas nilai tukar, BI memperkuat kebijakan stabilisasi melalui intervensi di pasar valuta asing (valas). Intervensi ini dilakukan dengan menjual dolar AS untuk menahan pelemahan rupiah dan mengurangi ketidakpastian pasar. Bank Indonesia (2024) menegaskan bahwa intervensi valas terbukti efektif dalam menstabilkan rupiah,

terutama di tengah tekanan eksternal yang tinggi. Selain itu, BI juga mengoptimalkan instrumen derivatif untuk memperdalam pasar keuangan domestik. Selain intervensi valas, pemerintah dan BI memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) untuk meningkatkan ketersediaan cadangan devisa. Kebijakan ini mendorong eksportir untuk menempatkan DHE di perbankan domestik sehingga memperkuat likuiditas valas dalam negeri. Menurut Kementerian Keuangan (2023), peningkatan kepatuhan atas penempatan DHE mampu memperkuat stabilitas nilai tukar dan menurunkan risiko inflasi akibat depresiasi. Upaya ini menjadi penting mengingat volatilitas pasar global yang tinggi pada 2025.

Secara keseluruhan, stabilitas nilai tukar merupakan komponen utama dalam strategi pengendalian inflasi di Indonesia pada 2025. Depresiasi rupiah dapat menambah tekanan inflasi baik melalui jalur harga impor maupun biaya produksi domestik. Melalui kombinasi intervensi valas, penguatan cadangan devisa, dan koordinasi kebijakan moneter-fiskal, BI berupaya meminimalkan dampak eksternal terhadap inflasi. Dengan demikian, manajemen nilai tukar menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan ekonomi nasional.

Peran Belanja Pemerintah dalam Mengendalikan Inflasi

Belanja pemerintah memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi nasional seperti pangan dan energi. Kementerian Keuangan RI (2023) menegaskan bahwa belanja negara pada dua sektor tersebut membantu meningkatkan pasokan, memperkuat distribusi, dan menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Dengan intervensi fiskal melalui penyediaan stok pangan dan subsidi energi, pemerintah dapat menahan laju inflasi yang biasanya meningkat akibat kekurangan pasokan atau fluktuasi harga global.

Belanja pemerintah pada sektor pangan berfungsi sebagai penyeimbang ketika terjadi guncangan pasokan, misalnya akibat cuaca ekstrem atau gangguan rantai pasok. Penambahan alokasi anggaran untuk cadangan pangan pemerintah dan stabilisasi harga komoditas pokok terbukti mampu menahan inflasi pangan yang bersifat *volatile food inflation* (BPS, 2024). Intervensi seperti operasi pasar dan penguatan cadangan beras pemerintah (CBP) membantu meringankan tekanan inflasi yang rentan berubah dari waktu ke waktu.

Pada sektor energi, kebijakan subsidi dan kompensasi harga menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Menurut IEA (2024), negara-negara berkembang seperti Indonesia cenderung mempertahankan subsidi energi untuk menahan tekanan inflasi yang berasal dari perubahan harga BBM dan listrik. Dengan menahan kenaikan harga energi, pemerintah dapat meminimalkan tekanan inflasi *cost-push* yang biasanya menjalar ke seluruh sektor ekonomi.

Belanja pemerintah juga memiliki dampak jangka panjang terhadap inflasi melalui pembangunan infrastruktur. Investasi pada jalan, pelabuhan, irigasi, dan logistik membantu menurunkan biaya produksi dan distribusi barang. Sebagaimana dijelaskan oleh Todaro & Smith (2020), pembangunan infrastruktur meningkatkan efisiensi perekonomian dan memperbaiki kapasitas penawaran (*supply capacity*), sehingga mengurangi tekanan inflasi struktural. Dengan biaya logistik yang lebih rendah, harga barang terutama pangan dapat lebih stabil dari waktu ke waktu.

Selain meningkatkan kapasitas produksi, belanja infrastruktur turut menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan meningkatnya efisiensi dalam rantai pasok, biaya distribusi dapat ditekan, sehingga margin kenaikan harga dapat diminimalkan. Bank Dunia (2024) menekankan bahwa perbaikan infrastruktur distribusi di negara berkembang berperan penting dalam mengurangi ketidakpastian pasokan dan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok.

Belanja pemerintah juga berperan sebagai stimulus fiskal yang dapat mendorong produksi sektor-sektor tertentu ketika terjadi pelemahan ekonomi. Dengan meningkatkan kapasitas produksi, tekanan inflasi dari sisi permintaan dapat diredam. Keynesian Economics berargumen bahwa peningkatan belanja negara dalam situasi tertentu dapat memperbaiki gap antara permintaan dan penawaran agregat sehingga harga tetap stabil (Blinder, 2018). Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan fiskal *counter-cyclical* dalam menjaga inflasi tetap dalam kisaran sasaran.

Secara keseluruhan, peran belanja pemerintah merupakan elemen penting dalam pengelolaan inflasi di Indonesia. Melalui alokasi anggaran pada sektor pangan, energi, dan infrastruktur, pemerintah tidak hanya mengendalikan inflasi jangka pendek, tetapi juga memperkuat stabilitas harga dalam jangka panjang. Kombinasi antara intervensi langsung pada harga dan kebijakan struktural yang meningkatkan kapasitas ekonomi menjadi strategi komprehensif dalam menjaga inflasi berada pada level yang stabil dan terkendali.

Inflasi Pangan dan Kebijakan Stabilitas Harga

Inflasi pangan merupakan komponen yang paling dominan dalam struktur inflasi Indonesia dan sering kali menjadi faktor utama perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). BPS (2024) mencatat bahwa kelompok volatile food menyumbang porsi besar terhadap fluktuasi inflasi bulanan karena sangat dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan dinamika pasar. Tingginya sensitivitas pangan terhadap guncangan eksternal maupun domestik menjadikan pengendalian inflasi pangan sebagai fokus kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Salah satu faktor utama inflasi pangan adalah kondisi cuaca yang tidak menentu, terutama fenomena El Niño dan La Niña yang berdampak pada produksi komoditas pertanian. Perubahan pola curah hujan dapat menurunkan produksi beras, cabai, bawang, dan komoditas hortikultura lain yang sensitif terhadap perubahan iklim. Menurut FAO (2024), ketidakpastian iklim menjadi tantangan serius bagi negara agraris seperti Indonesia karena dapat menyebabkan kesenjangan antara permintaan dan pasokan pangan, sehingga memicu kenaikan harga secara signifikan.

Selain faktor cuaca, masalah distribusi juga menjadi sumber utama tekanan inflasi pangan. Ketergantungan terhadap rantai distribusi panjang, keterbatasan infrastruktur logistik, serta efisiensi transportasi yang belum merata menyebabkan biaya distribusi pangan relatif tinggi. Bank Dunia (2024) menegaskan bahwa biaya logistik yang tinggi di Indonesia dapat berkontribusi hingga 40% terhadap harga akhir komoditas pangan. Kondisi ini menjadikan perbaikan distribusi dan logistik sebagai langkah strategis dalam mengendalikan inflasi pangan secara berkelanjutan.

Faktor eksternal berupa fluktuasi harga komoditas global, terutama beras, gandum, dan minyak nabati, juga memberikan tekanan signifikan terhadap inflasi pangan domestik. Sebagai negara yang masih mengimpor beberapa komoditas penting, perubahan harga global langsung berdampak pada harga pangan dalam negeri. OECD (2024) menjelaskan bahwa perubahan kebijakan perdagangan negara eksportir pangan dan gangguan geopolitik dapat memicu lonjakan harga global, sehingga meningkatkan risiko inflasi pangan di negara-negara importir termasuk Indonesia.

Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerapkan berbagai kebijakan intervensi. Bapanas (2024) menekankan pentingnya penguatan stok pangan pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasokan, terutama menjelang periode rawan inflasi seperti hari besar keagamaan. Selain itu, program bantuan pangan bertujuan menjaga daya beli kelompok rentan, sementara operasi pasar dilakukan untuk menekan harga komoditas yang mengalami lonjakan. Kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam meredam fluktuasi harga jangka pendek.

Secara keseluruhan, pengendalian inflasi pangan memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan produksi, perbaikan distribusi, serta intervensi harga secara strategis. Upaya jangka panjang seperti penguatan infrastruktur logistik, modernisasi pertanian, dan diversifikasi sumber pangan juga diperlukan agar stabilitas harga lebih berkelanjutan. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, inflasi pangan dapat dikelola secara efektif sehingga mendukung stabilitas ekonomi nasional dan menjaga daya beli masyarakat.

Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal

Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi elemen fundamental dalam menjaga stabilitas makroekonomi, terutama dalam menghadapi tekanan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Menurut Mankiw (2020), kedua instrumen kebijakan ini tidak dapat bekerja secara optimal jika berjalan sendiri-sendiri, sehingga koordinasi yang kuat antarotoritas diperlukan untuk mencegah ketidakseimbangan kebijakan yang dapat

memperburuk kondisi ekonomi. Dalam konteks Indonesia, hubungan erat antara Bank Indonesia dan pemerintah telah menjadi komponen strategis dalam desain kebijakan stabilisasi jangka pendek maupun jangka panjang.

Kebijakan moneter yang bersifat kontraktif, seperti kenaikan suku bunga acuan untuk menekan inflasi, dapat berdampak pada penurunan konsumsi dan investasi. Pada situasi ini, peran kebijakan fiskal menjadi sangat penting untuk memberikan stimulus yang bersifat terarah melalui belanja produktif. Pemerintah dapat memperkuat program padat karya, bantuan sosial, serta insentif fiskal untuk menjaga daya beli rumah tangga dan mendorong aktivitas sektor riil (Kementerian Keuangan RI, 2023). Dengan demikian, pengaruh negatif dari pengetatan moneter dapat ditekan tanpa mengorbankan tujuan stabilitas harga. Selain itu, belanja pemerintah yang diarahkan pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional, sehingga memperkuat sisi penawaran ekonomi. Ketika kapasitas produksi meningkat, tekanan inflasi jangka panjang dapat berkurang karena perekonomian menjadi lebih efisien (Samuelson & Nordhaus, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berperan sebagai stabilisator jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi jangka panjang.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berperan penting dalam memastikan koordinasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Forum ini menjadi wadah untuk merumuskan respons terpadu dalam menghadapi risiko sistemik, termasuk risiko inflasi, pelemahan nilai tukar, dan ketidakpastian global yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. KSSK memastikan bahwa intervensi otoritas moneter dan fiskal berjalan sejalan dan saling mendukung (KSSK, 2024).

Dengan adanya sinergi tersebut, kebijakan moneter yang mengetat tidak serta-merta melemahkan aktivitas ekonomi secara drastis, karena pemerintah dapat mengimbangnya melalui kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif namun tetap terarah. Misalnya, pada periode tekanan inflasi, BI dapat menaikkan BI7DRR untuk mengendalikan permintaan agregat, sementara pemerintah tetap menjaga kestabilan konsumsi masyarakat melalui subsidi energi atau bantuan sosial (Bank Indonesia, 2023). Kombinasi kebijakan yang saling melengkapi ini membantu menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Koordinasi kebijakan juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori makroekonomi modern, kebijakan moneter cenderung bersifat jangka pendek dalam menstabilkan fluktuasi ekonomi, sementara kebijakan fiskal memainkan peran yang lebih struktural dalam memperkuat fondasi pertumbuhan (Blanchard, 2021). Oleh karena itu, keselarasan kedua kebijakan menjadi penting agar tidak terjadi kontradiksi kebijakan yang berpotensi menurunkan efektivitas keseluruhan.

Secara keseluruhan, sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal merupakan prasyarat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi, dan ketahanan sistem keuangan nasional. Melalui koordinasi yang efektif, terutama dalam kerangka KSSK, Indonesia dapat merespons dinamika ekonomi global dengan lebih adaptif dan terukur. Hal ini memastikan bahwa stabilitas harga tetap terjaga tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia pada tahun 2025 merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor moneter, fiskal, dan eksternal yang memengaruhi dinamika harga secara simultan. Instrumen kebijakan moneter, terutama suku bunga kebijakan dan pengendalian jumlah uang beredar (M2), terbukti menjadi mekanisme utama dalam menjaga stabilitas harga. Ketika tekanan permintaan meningkat atau terjadi lonjakan inflasi dari faktor eksternal, pengetatan kebijakan moneter memberikan sinyal kredibel kepada pasar dan membantu menahan ekspektasi inflasi. Di sisi fiskal, peran belanja negara yang diarahkan pada sektor-sektor produktif, termasuk pertanian, energi, serta infrastruktur logistik, mampu memitigasi tekanan inflasi dari sisi penawaran. Kebijakan subsidi pangan dan energi juga menjadi penopang penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan yang paling terdampak gejolak harga. Upaya stabilisasi pangan melalui penguatan cadangan, operasi pasar, dan intervensi distribusi memperlihatkan kontribusi signifikan terhadap

pengendalian inflasi pangan yang secara historis menjadi kontributor terbesar inflasi nasional. Faktor eksternal seperti volatilitas nilai tukar, gejolak harga komoditas global, dan ketidakpastian geopolitik turut memberikan tekanan tambahan terhadap inflasi domestik. Kondisi ini menuntut respons kebijakan yang adaptif, baik dalam bentuk stabilisasi nilai tukar maupun penguatan ketahanan pangan dan energi. Dalam konteks 2025, kebijakan moneter dan fiskal dituntut tidak hanya reaktif terhadap tekanan inflasi, tetapi juga antisipatif terhadap potensi gejolak yang bersumber dari dinamika global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S. L., Aliyah, F., Sofyan, M. A., & Astuti, R. P. (2025). Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Mengendalikan Inflasi Dan Stabilitas Ekonomi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 243-245.
- Arif, I. T. B., Wati, S., Gunanto, M., Ardiansyah, A., & Malik, A. (2024). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI DI PROVINSI LAMPUNG PADA TAHUN 2021-2023. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 8654-8662.
- Astuti, R. P., Putri, S. A., & Samsudin, A. (2025). Kebijakan Moneter: Peran Bank Sentral Dalam Mengendalikan Inflasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, 1(4), 583-587.
- Badan Pangan Nasional (Bapanas). (2024). *Laporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics (8th ed.)*. Pearson.
- Blinder, A. (2018). *Keynesian Economics: Beliefs and Applications*. Princeton University Press.
- Britania, Y., Septiani, D., Ghibran, M. H., & Siregar, P. A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Menjaga Dan Menciptakan Stabilitas Perekonomian Indonesia Menurut Perspektif Islam. *Media Mahardhika*, 22(3), 417-428.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- FAO. (2024). *State of Food Security and Climate Impacts*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Ghofur, M. A., Yuliani, Y., & Mutafarida, B. (2024). Pandangan ekonomi islam tentang pengendalian inflasi, kebijakan moneter dan fiskal. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 384-392.
- Ginting, A. M. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi: studi kasus di Indonesia periode tahun 2004-2014. *Kajian*, 21(1), 37-58.
- IMF. (2024). *World Economic Outlook: Navigating Global Uncertainty*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN dan Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Laporan APBN dan Stabilitas Ekonomi*. Jakarta: Kemenkeu.
- Krugman, P., & Obstfeld, M. (2018). *International Economics: Theory and Policy*. Pearson.
- KSSK. (2024). *Laporan Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan*. Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- Latif, A., Wonggole, D. U., & Palete, S. (2024). Sinergitas Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal Untuk Mengendalikan Inflasi di Indonesia. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(1), 14-27.
- Maksud, S. R., & Sudirman, S. (2024). PERAN KEBIJAKAN MONETER DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI INDONESIA. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(4), 423-428.
- Mankiw, N. G. (2020). *Macroeconomics (10th ed.)*. New York: Worth Publishers.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage.

- Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. New York: Pearson.
- Mutiara, A., Siregar, I. S., Chairani, M., Nur, L. M., Afriyanti, Y., & Nadilla, T. (2024). Peran kebijakan fiskal dalam mendukung stabilitas ekonomi makro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 212-226.
- Nuraini, I. L., Mukarromah, S. S., Putri, Z. D. D., & Astuti, R. P. (2025). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Harga Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 207-213.
- Obstfeld, M., & Rogoff, K. (2022). *Foundations of International Macroeconomics*. MIT Press.
- Opriyanti, R., & Wilantari, R. N. (2017). Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Inflasi Di Indonesia. *Media Trend*, 12(2), 184-198.
- Paramita, R. (2021). Efektivitas Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Dalam Mengatasi Inflasi Di Indonesia Periode 1984-2019. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 6(1), 152-168.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Prameswati, D., Nabiha, F. H., Octaviani, F. T., Puri, G. A., Nugroho, K. A. P., & Nuraya, A. S. (2025). Dinamika Inflasi di Indonesia, Analisis Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3), 53-67.
- Purwiyanti, T., & Panjawa, J. L. (2022). Peran kebijakan moneter dan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 7(2), 220-228.
- Samuelson, P., & Nordhaus, W. (2019). *Economics (20th ed.)*. New York: McGraw-Hill.
- Saputra, K., & Nugroho, S. B. M. (2013). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia 2007-2012* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Sari, M. D. A. P., Moehadi, M., & Anggapratama, R. (2023). Analisis Faktor Penentu Pengendalian Inflasi Berdasarkan Kebijakan Moneter Kuantitatif di Indonesia Tahun 2012-2021. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 409-416.
- Septiani, S., Rahmawati, T., Oktariani, V. D., Evi, E., & Fadilla, A. (2024). Peran kebijakan moneter di Indonesia dalam menghadapi inflasi. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(3), 1-7.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of business research*, 104, 333-339.
- Syata, W. M., & Subur, H. (2025). Peran Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 495-501.
- Todaro, M. P., & Smith, S. (2021). *Economic Development (13th ed.)*. New York: Pearson.
- World Bank. (2024). *Global Economic Prospects*. Washington, DC: World Bank.
- Yuliani, T. W., Mujib, M., & Lestari, M. (2024). Interaksi Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Economic and Education Journal (Ecoducation)*, 6(1), 57-77.
- Zulaikah, Z. (2025). Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), 95-108.